

Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mengurangi Kesenjangan Digital di Kabupaten Gunungkidul

Author:

Muhammad Kharis Abdilah^{1*}, Ikhbaluddin²

Affiliation:

Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711, Indonesia¹
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor 45363, Indonesia²

e-Mail: 33.0503@praja.ipdn.ac.id¹, ikhbaluddin@ipdn.ac.id²,

*Correspondence Author



Received, 07 Juni 2026

Revised, 11 Agustus 2026

Accepted, 01 September 2026

Available Online, 03 September 2026

Abstrak

Kabupaten Gunungkidul menghadapi persoalan kesenjangan digital yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah menjalankan berbagai program, indeks literasi digital masyarakat masih stagnan di angka 56,8 dan 29 desa masih berstatus blank spot. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi yang telah dilakukan Diskominfo Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kesenjangan digital serta merumuskan strategi yang tepat ke depannya. Pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik berbantuan NVivo 15, dikombinasikan dengan analisis SWOT dan Tes Litmus berdasarkan kerangka teori kesenjangan digital Van Dijk dan perencanaan strategis Bryson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo telah menjalankan strategi pada empat dimensi Van Dijk, yaitu motivational, material, skills, dan usage access, namun implementasinya belum merata akibat keterbatasan jaringan, SDM, dan keterampilan digital masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT dan Tes Litmus, strategi prioritas yang tepat adalah: pengembangan sistem informasi publik yang aman dan adaptif, layanan digital inklusif dan hibrida, penguatan kapasitas kelembagaan melalui kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi pemerataan infrastruktur berbasis wilayah prioritas, didukung oleh penguatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesenjangan Digital, Strategi Pemerintah Daerah, Literasi Digital, Analisis SWOT.

Abstract

Gunungkidul Regency faces a digital divide marked by an imbalance between infrastructure development and community empowerment. Despite various programs implemented by the Department of Communication and Information Technology (Diskominfo), the community digital literacy index remains stagnant at 56.8 and 29 villages remain in blank spot status. This study aims to analyze Diskominfo's strategies in reducing the digital divide and to formulate appropriate future strategies. A qualitative approach with a constructivist

paradigm was applied, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis employed thematic analysis assisted by NVivo 15, combined with SWOT analysis and the Litmus Test, grounded in Van Dijk's digital divide theory and Bryson's strategic planning framework. The findings reveal that Diskominfo has implemented strategies across Van Dijk's four dimensions, motivational, material, skills, and usage access, yet implementation remains uneven due to unstable network coverage, limited human resources, and insufficient digital skills. Based on the SWOT and Litmus Test analyses, the appropriate priority strategies include developing a secure and adaptive public information system, providing inclusive and hybrid digital services, strengthening institutional capacity through cross-sector collaboration, and optimizing infrastructure equity based on priority areas, supported by sustainable digital literacy programs.

Keywords: Digital Divide, Local Government Strategy, Digital Literacy, SWOT Analysis.

1. Pendahuluan

Pemerintahan daerah memiliki peran fundamental dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur digital. Dalam era transformasi digital, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui ketersediaan infrastruktur fisik, melainkan juga infrastruktur digital yang menopang penyediaan layanan publik yang efektif (Wagola et al., 2023). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai leading sector digital pemerintah daerah dituntut tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Van Dijk (2020) menjelaskan bahwa kesenjangan digital muncul karena perbedaan dalam motivasi, akses terhadap perangkat, keterampilan menggunakan teknologi, dan kemampuan memanfaatkannya secara produktif. Kabupaten Gunungkidul di Provinsi DIY merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi kesenjangan digital akibat kondisi geografis perbukitan karst dan keterbatasan jaringan telekomunikasi. Berdasarkan data Renstra Diskominfo 2021-2026, sebanyak 29 desa masih berstatus blank spot dan indeks literasi digital masyarakat stagnan di angka 56,8, jauh dari target 70 pada 2026.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar kajian tentang kesenjangan digital di Indonesia masih berfokus pada aspek infrastruktur tanpa secara komprehensif mengkaji efektivitas strategi kelembagaan pemerintah daerah (Juanda & Izzulhaq, 2023; Susanti et al., 2023; Dimas & Fahlevvi, 2024). Kajian

terbaru bahkan menemukan bahwa skor literasi digital yang relatif baik tidak selalu diikuti oleh adopsi layanan pemerintah digital yang tinggi, sehingga aspek kelembagaan dan kepercayaan publik menjadi variabel yang tidak kalah penting dibanding ketersediaan infrastruktur semata (Matutina & Fahlevvi, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara teori kesenjangan digital Van Dijk dengan analisis SWOT dan Tes Litmus dalam konteks kelembagaan pemerintah daerah, sehingga menghasilkan analisis strategis yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Urgensi kajian ini juga sejalan dengan arah Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024 yang mengamanatkan pemerataan infrastruktur sekaligus penguatan tata kelola keamanan siber di tingkat daerah (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021). Ancaman peretasan sistem pemerintah dan kebocoran data yang kian meningkat seiring perluasan layanan digital menjadikan strategi penguatan Diskominfo bukan sekadar upaya pemerataan akses, melainkan juga bagian dari ketahanan siber daerah yang terintegrasi dengan kebijakan digital nasional. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis strategi yang telah dilakukan Diskominfo Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kesenjangan digital melalui empat dimensi Van Dijk, dan (2) merumuskan strategi prioritas yang tepat berdasarkan analisis SWOT dan Tes Litmus.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran fenomena strategi kelembagaan Diskominfo secara faktual tanpa memanipulasi variabel (Sugiyono, 2023; Creswell & Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dan beberapa wilayah masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada Desember 2025-Januari 2026.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara semi-terstruktur mendalam (in-depth interview) dengan aparatur Diskominfo (Sekretaris Dinas,

Kepala Bidang Layanan Informatika), teknisi lapangan, dan masyarakat; (2) observasi partisipatif terhadap kondisi infrastruktur digital, titik Wi-Fi publik, dan partisipasi masyarakat; serta (3) dokumentasi terhadap Renstra, LKjIP, dan data statistik digital daerah.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yang diperluas dengan snowball sampling hingga tercapai kejenuhan data. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai alat bantu analisis tematik, digunakan NVivo 15 untuk pengodean, pengelompokan tema, dan visualisasi data (word cloud, hierarchy chart, matrix coding query).

Penelitian ini melibatkan 17 informan yang terdiri atas 1 Sekretaris Dinas, 2 Kepala Bidang, 4 orang staf teknis/operator jaringan, 4 orang pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta 6 orang perwakilan masyarakat pengguna layanan digital yang tersebar di 6 kalurahan pada tiga kapanewon dengan karakteristik geografis berbeda, yaitu Kapanewon Wonosari (Zona Tengah), Kapanewon Patuk (Zona Baturagung), dan Kapanewon Tepus (Zona Pegunungan Seribu/karst). Pemilihan tiga kapanewon ini dimaksudkan untuk menangkap variasi kondisi infrastruktur dan literasi digital antarwilayah. Kejenuhan data (data saturation) tercapai pada informan ke-15, ditandai dengan tidak munculnya tema baru yang signifikan dari dua informan terakhir.

Kerangka analisis penelitian ini mengintegrasikan tiga landasan teoritis: (1) Teori Kesenjangan Digital Van Dijk (2020) dengan empat dimensi motivational, material, skills, dan usage access sebagai alat diagnosis kondisi kesenjangan; (2) kerangka perencanaan strategis Bryson (2008) untuk memahami proses perumusan strategi organisasi publik; dan (3) analisis SWOT (Rangkuti, 2016) dan Tes Litmus sebagai alat evaluasi dan prioritasasi isu strategis. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, serta member check kepada informan.

Sejalan dengan paradigma konstruktivisme yang digunakan, penulis menyadari posisi diri (positionality) sebagai bagian dari proses konstruksi makna

dalam penelitian ini. Penulis menjalani proses pembimbingan skripsi dengan salah satu dosen yang karyanya turut dirujuk dalam artikel ini (Ikhbaluddin, 2020). Untuk menjaga objektivitas, sitasi tersebut digunakan murni karena relevansi tematiknya dengan strategi pemerintah daerah dalam penerapan teknologi informasi pemerintahan, bukan sebagai bentuk self-citation yang tidak substantif, dan penulis secara eksplisit mengakui potensi bias supervisi ini sebagai salah satu keterbatasan epistemologis penelitian.

Untuk memenuhi kriteria keabsahan data penelitian kualitatif, penelitian ini mengacu pada empat kriteria trustworthiness (Lincoln & Guba, dalam Creswell & Creswell, 2018), yaitu kredibilitas melalui triangulasi sumber, teknik, dan member check; transferabilitas melalui deskripsi konteks penelitian yang rinci (thick description) agar temuan dapat dipertimbangkan penerapannya pada konteks serupa; dependabilitas melalui audit trail berupa rekaman wawancara, catatan lapangan, dan hasil pengodean NVivo 15 yang terdokumentasi secara sistematis; serta konfirmabilitas melalui diskusi hasil analisis tematik dengan sesama peneliti (peer debriefing) untuk meminimalkan bias interpretasi tunggal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Strategi Diskominfo Berdasarkan Empat Dimensi Van Dijk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Gunungkidul telah menjalankan strategi yang menyasar keempat dimensi kesenjangan digital menurut Van Dijk (2020), meskipun efektivitasnya masih belum merata di seluruh wilayah.

3.1.1. Dimensi Motivational Access

Pada dimensi motivational access, strategi Diskominfo diarahkan pada upaya menumbuhkan dorongan awal masyarakat untuk menerima dan memanfaatkan teknologi digital. Strategi ini dilakukan melalui sosialisasi manfaat teknologi, edukasi literasi digital, penyebaran informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi, serta pembinaan 1.429 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di seluruh padukuhan.

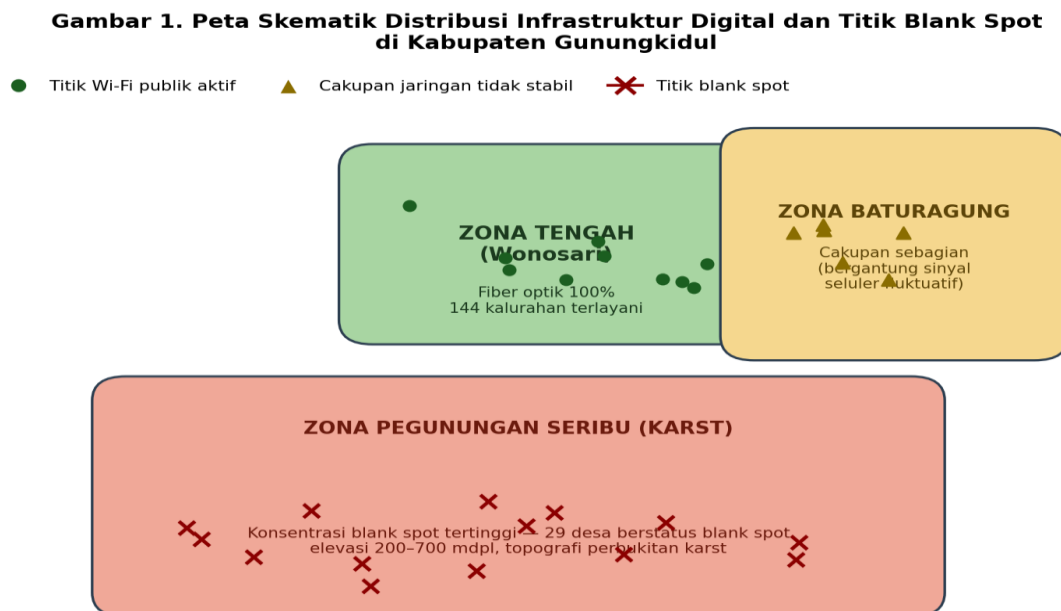
Temuan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang teknologi sebagai kebutuhan, terutama untuk sektor perdagangan, pendidikan, dan komunikasi. Namun, kelompok usia lanjut dan masyarakat di wilayah terpencil masih menunjukkan ketertarikan yang lebih rendah. Dari analisis NVivo 15, indikator minat dan persepsi manfaat cenderung menunjukkan strength, sementara tingkat kesadaran digital menunjukkan weakness karena IMDI Kabupaten Gunungkidul masih berada pada skor 46,62 (kategori cukup) dan literasi digital masih di bawah rata-rata DIY. Sebagai pembandingan, skor IMDI Provinsi DIY tahun 2024 tercatat sebesar 47,10, menjadikan DIY salah satu dari lima provinsi berkategori tinggi secara nasional (Badan Pengembangan SDM Kominformasi, 2024). Dengan demikian, skor IMDI Gunungkidul sesungguhnya relatif tidak jauh tertinggal dari rata-rata provinsi, namun tetap berada di bawahnya, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan literasi digital di Gunungkidul lebih bersifat kesenjangan intra-regional (antarwilayah dalam kabupaten) dibandingkan kesenjangan Gunungkidul terhadap DIY secara keseluruhan.

3.1.2. Dimensi Material Access

Pada dimensi material access, strategi Diskominfo diwujudkan melalui: pembangunan titik Wi-Fi publik (64 titik aktif pada 2024, menuju target 80 titik pada 2026); penyediaan jaringan fiber optik dedicated untuk 144 kalurahan (100%); inovasi JARIK AGUNG untuk penanganan blank spot; serta intervensi berbasis prioritas dengan memanfaatkan KIM sebagai sistem informasi bottom-up. JARIK AGUNG (Jaringan Internet Kampung Antar Gunung) merupakan inovasi teknis Diskominfo yang memanfaatkan kombinasi tower relay dan perangkat penguat sinyal berbiaya rendah untuk menjangkau permukiman di lembah dan cekungan karst yang secara topografis sulit dijangkau oleh menara BTS konvensional. Skema ini dikembangkan secara swadaya bersama operator jaringan lokal dan pemerintah kalurahan, sehingga biaya investasi dapat ditekan dibandingkan pembangunan infrastruktur fiber optik penuh ke seluruh wilayah blank spot. Meskipun demikian, keterbatasan kapasitas bandwidth pada skema ini masih menjadi kendala untuk mendukung layanan digital yang membutuhkan

koneksi stabil dan berkapasitas besar, seperti telekonsultasi kesehatan atau pembelajaran daring interaktif, sehingga diperlukan peningkatan bertahap seiring dengan ketersediaan anggaran daerah.

Meski demikian, ketimpangan infrastruktur spasial masih nyata. Konsentrasi jaringan fiber optik terpusat di Zona Tengah (Wonosari), sementara wilayah perbukitan di Baturagung dan bentang karst di Pegunungan Seribu masih sangat bergantung pada sinyal seluler yang fluktuatif. Karakteristik topografi berbukit dengan elevasi 200-700 mdpl menyebabkan penyediaan jaringan membutuhkan intervensi aktif pemerintah yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.



Gambar 1. Peta skematik distribusi infrastruktur digital dan titik blank spot di Kabupaten Gunungkidul (ilustrasi berdasarkan data Renstra Diskominfo 2021-2026 dan hasil observasi lapangan)

3.1.3. Dimensi Skills Access

Pada dimensi skills access, strategi dilakukan melalui pelatihan literasi digital (23 kegiatan pada 2024 dari target 30 kegiatan pada 2026), bimtek penguatan kapasitas KIM, dan kerja sama dengan Kementerian Komdigi melalui program Digital Line. Hasil analisis tematik NVivo 15 menunjukkan bahwa masyarakat usia

produktif dan generasi muda sudah memiliki kemampuan operasional dasar, namun kemampuan informasional dan strategis, yakni kemampuan memanfaatkan teknologi secara produktif untuk usaha atau layanan publik, masih terbatas pada sebagian besar kelompok masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Diningrat dkk. (2022) bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat utama transformasi digital di berbagai daerah di Indonesia, sehingga penguatan literasi digital tidak cukup hanya menasar pengguna akhir (end-user) tetapi juga aparatur penyelenggara layanan itu sendiri. Haniko dkk. (2023) turut menegaskan bahwa jembatan kesenjangan digital yang efektif memerlukan empat unsur sekaligus, yaitu akses terhadap teknologi, pelatihan yang berkelanjutan, dukungan teknis, dan peluang pemanfaatan yang nyata bagi masyarakat; program bimtek dan kerja sama Digital Line yang dijalankan Diskominfo Gunungkidul baru menjawab dua unsur pertama, sementara dukungan pascapelatihan dan peluang pemanfaatan produktif masih perlu diperkuat.

3.1.4. Dimensi Usage Access

Pada dimensi usage access, strategi Diskominfo tercermin pada dorongan pemanfaatan layanan publik digital (IKD, SP4N LAPOR, ARKAS, Srikandi), program Smart Village, dan fasilitasi UMKM digital. Data portal pemerintah mencatat 4.100 pengguna aktif dan 23.000 page views dalam 28 hari terakhir. Observasi menunjukkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat masih didominasi WhatsApp, TikTok, dan Facebook untuk komunikasi dan hiburan. Pemanfaatan layanan pemerintah secara digital masih relatif rendah, terutama pada kelompok masyarakat usia tua dan wilayah terpencil.

Rendahnya pemanfaatan layanan pemerintah secara digital pada kelompok tertentu ini konsisten dengan temuan Nurhidayat dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam ekosistem e-government di Indonesia masih timpang antarkelompok sosial-demografis, dengan indeks e-partisipasi yang jauh lebih rendah pada kelompok lanjut usia dan wilayah dengan keterbatasan

infrastruktur. Susilawati dkk. (2023) juga mencatat bahwa hambatan implementasi e-government di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan dan budaya digital masyarakat, sebuah pola yang turut teramati pada dominasi penggunaan aplikasi hiburan (WhatsApp, TikTok, Facebook) dibandingkan aplikasi layanan publik digital di Kabupaten Gunungkidul.

3.2. Analisis NVivo 15: Visualisasi Tematik

Analisis tematik berbantuan NVivo 15 menghasilkan empat kluster tema utama yang bersesuaian dengan dimensi Van Dijk. Hierarchy chart menunjukkan bahwa material access merupakan dimensi dengan bobot kodifikasi tertinggi, mencerminkan dominasi persoalan infrastruktur dalam wacana kesenjangan digital Gunungkidul. Matrix coding query berdasarkan jenis informan memperlihatkan perbedaan perspektif yang signifikan antara aparatur Diskominfo, teknisi lapangan, dan masyarakat pengguna, di mana aparatur lebih menekankan aspek kelembagaan dan capaian program, sementara masyarakat lebih menyoroti kualitas jaringan dan aksesibilitas layanan.

Word cloud hasil NVivo 15 menampilkan kata-kata dominan seperti “jaringan”, “KIM”, “literasi”, “blank spot”, dan “pelatihan”, yang mencerminkan fokus utama wacana kesenjangan digital di lapangan. Sementara itu, hasil coding query silang antara dimensi Van Dijk dan jenis informan menunjukkan bahwa tema “keterbatasan anggaran” dan “koordinasi lintas OPD” paling sering muncul dari perspektif aparatur, sedangkan tema “kualitas sinyal” dan “kemudahan akses layanan” lebih dominan dari perspektif masyarakat dan teknisi lapangan. Perbedaan penekanan ini menegaskan pentingnya pendekatan multi-perspektif dalam merumuskan strategi kebijakan agar tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi juga responsif terhadap pengalaman nyata pengguna layanan di lapangan.

3.3. Identifikasi Isu Strategis melalui Analisis SWOT

Berdasarkan temuan lapangan, analisis SWOT mengidentifikasi faktor internal dan eksternal Diskominfo sebagai berikut.

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Dukungan anggaran program digital besar (Rp 10,8 M untuk aplikasi informatika) 144 kalurahan sudah terlayani fiber optik 100% 1.429 KIM aktif sebagai jaringan informasi bottom-up Tim TRC dan Data Center operasional	Jumlah SDM teknis yang masih sangat kurang; kondisi multi-tasking IMDI Gunungkidul 46,62 masih kategori cukup Ketergantungan program pada anggaran vertikal Kapasitas pemantauan sistem belum optimal
Peluang (O)	Ancaman (T)
Dukungan program SPBE nasional dan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 Potensi kolaborasi lintas OPD, universitas, dan operator swasta Pertumbuhan pengguna internet usia produktif yang signifikan	Topografi karst dan blank spot yang sulit diatasi secara teknis Ancaman disinformasi dan judi online; Gunungkidul tertinggi di DIY Peretasan sistem pemerintah dan kebocoran data Kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor primer

Setiap poin dalam matriks SWOT tersebut bersumber dari kombinasi data primer dan sekunder. Poin-poin pada kuadran kekuatan dan kelemahan (anggaran, capaian fiber optik, jumlah KIM, kondisi SDM) bersumber dari dokumentasi Renstra dan LKjIP Diskominfo Kabupaten Gunungkidul serta hasil wawancara dengan aparatur. Poin ancaman disinformasi dan perjudian daring diperkuat oleh data eksternal: Dinas Sosial DIY mencatat Kabupaten Gunungkidul sebagai wilayah dengan indikasi rekening penerima bantuan sosial terkait judi daring terbanyak se-DIY, yakni 2.397 dari total 7.001 rekening terindikasi di seluruh provinsi (Kabar Jawa, 2025). Kondisi ini memperkuat urgensi penguatan literasi dan keamanan digital sebagai bagian dari strategi Diskominfo.

3.4. Prioritisasi Isu melalui Tes Litmus

Enam isu strategis yang dihasilkan dari matriks SWOT selanjutnya diuji tingkat kestrategisannya menggunakan Tes Litmus berdasarkan kerangka Bryson (2008). Penilaian dilakukan oleh tiga responden pejabat Diskominfo dengan skala 1-3 pada 13 pertanyaan dimensi strategis.

Kategorisasi hasil Tes Litmus mengacu pada ambang batas skor rata-rata sebagai berikut: skor $\geq 2,00$ dikategorikan “Sangat Strategis”, skor 1,34–1,99 dikategorikan “Strategis”, dan skor $< 1,34$ dikategorikan “Kurang Strategis”. Penulis menyadari bahwa pelibatan tiga responden yang seluruhnya merupakan pejabat internal Diskominfo berpotensi menimbulkan bias evaluasi-diri (self-assessment bias) terhadap program institusi sendiri. Keterbatasan ini diminimalkan melalui triangulasi dengan data primer wawancara masyarakat dan dokumentasi Renstra/LKjIP, namun idealnya penelitian lanjutan melibatkan unsur eksternal atau independen, seperti akademisi atau organisasi masyarakat sipil, dalam proses penilaian Tes Litmus untuk memperkuat objektivitas hasil.

Isu Strategis	Rata-rata Skor	Kategori
Pengembangan sistem informasi publik yang aman, adaptif, dan responsif terhadap ancaman geografis, gangguan jaringan, dan disinformasi	2,66	Sangat Strategis
Pengembangan layanan digital inklusif, adaptif, dan hibrida bagi masyarakat rentan serta wilayah hambatan akses tinggi	2,58	Sangat Strategis
Penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas dampak program digital	2,10	Sangat Strategis
Optimalisasi pemerataan infrastruktur digital dan titik layanan publik berbasis wilayah prioritas	2,07	Sangat Strategis
Penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan, usaha lokal, dan pelayanan publik	1,87	Strategis
Penguatan literasi digital dan pendampingan masyarakat berbasis KIM serta kelompok sasaran	1,82	Strategis

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Bryson (2008)

3.5. Rekomendasi Strategi Prioritas

Berdasarkan hasil Tes Litmus, empat isu dengan kategori sangat strategis menjadi strategi prioritas utama Diskominfo Kabupaten Gunungkidul dalam mengurangi kesenjangan digital:

Pertama, pengembangan sistem informasi dan komunikasi publik yang aman, adaptif, dan responsif. Strategi ini berangkat dari fakta bahwa hambatan geografis dan ancaman disinformasi membutuhkan sistem informasi yang tangguh dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Langkah konkret mencakup penguatan infrastruktur komunikasi redundan, pengembangan kanal informasi resmi yang beragam, dan mekanisme verifikasi informasi yang ketat sebelum dipublikasikan.

Selain ancaman disinformasi, strategi ini juga perlu merespons ancaman peretasan sistem pemerintah dan kebocoran data yang teridentifikasi dalam analisis SWOT. Langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain penguatan Tim Tanggap Darurat (TRC) dan Data Center yang telah beroperasi dengan protokol keamanan siber terstandardisasi, audit keamanan sistem secara berkala, serta pelatihan kesadaran keamanan siber (cyber security awareness) bagi aparatur pengelola data agar sistem informasi publik yang dikembangkan tidak hanya adaptif terhadap kendala geografis, tetapi juga tangguh terhadap ancaman siber yang terus berkembang seiring perluasan layanan digital pemerintah daerah.

Kedua, pengembangan layanan digital yang inklusif, adaptif, dan hibrida. Layanan digital tidak cukup dirancang untuk pengguna yang sudah melek teknologi. Diskominfo perlu membangun model layanan hibrida yang menggabungkan akses digital dengan dukungan luring melalui pendampingan operator desa dan titik bantuan layanan publik lokal, disertai penyederhanaan antarmuka layanan.

Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor. Keterbatasan SDM internal Diskominfo mengharuskan pengembangan pola kerja kolaboratif yang melibatkan pemerintah kalurahan, sekolah, operator jaringan, komunitas, dan OPD lain. Kolaborasi dengan universitas melalui skema magang dan penelitian menjadi salah satu opsi yang bersifat mutualisme.

Keempat, optimalisasi pemerataan infrastruktur digital berbasis wilayah prioritas. Pemerataan infrastruktur perlu dilakukan secara terencana berdasarkan peta prioritas wilayah yang disusun berdasarkan kualitas jaringan, keberadaan blank spot, jumlah kelompok rentan, dan kebutuhan layanan aktual, bukan sekadar pertimbangan administratif.

Ancaman ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor primer sesungguhnya dapat direspons secara langsung melalui strategi digital yang menyasar sektor tersebut. Praktik baik telah dirintis di Kabupaten Gunungkidul, misalnya digitalisasi retribusi pariwisata karst melalui sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan bersama Bank Indonesia Perwakilan DIY, Bank BPD DIY, dan Bank Mandiri untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pendapatan asli daerah dari sektor wisata (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2026). Selain itu, program digitalisasi UMKM berbasis pembayaran digital di Desa Gari, Gunungkidul, yang menyasar sekitar 100 pelaku UMKM dengan target 3.000 transaksi per bulan, menunjukkan potensi replikasi model serupa pada sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar wilayah karst (Universitas Indonesia, 2023). Diskominfo dapat memperluas peran ini dengan memfasilitasi integrasi data UMKM dan destinasi wisata karst ke dalam portal layanan digital daerah, sekaligus melatih KIM sebagai agen pendamping literasi digital bagi pelaku usaha sektor primer, sehingga strategi pengurangan kesenjangan digital sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

Dua isu berkategori strategis, penguatan pemanfaatan teknologi dan literasi digital berbasis KIM, berfungsi sebagai strategi pendukung yang memperkuat keberhasilan keempat strategi utama di atas. Program literasi digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang disesuaikan per kelompok sasaran (pelajar, UMKM, masyarakat umum, kelompok rentan).

Kedua isu pendukung ini juga memerlukan kejelasan penanggung jawab pelaksana: penguatan pemanfaatan teknologi digital untuk sektor pendidikan, usaha lokal, dan pelayanan publik sebaiknya dikoordinasikan bersama Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pendidikan, sementara penguatan literasi digital berbasis

KIM tetap berada di bawah koordinasi langsung Diskominfo dengan dukungan pendanaan dari APBD maupun kolaborasi lintas OPD. Agar keempat strategi prioritas dan dua strategi pendukung tersebut dapat diimplementasikan secara terukur, Tabel 3 berikut merangkum peta jalan implementasi jangka pendek dan menengah beserta indikator keberhasilannya.

Tabel 3. Peta Jalan Implementasi Strategi Prioritas Diskominfo Kabupaten Gunungkidul

Strategi Prioritas	Target Jangka Pendek (± 1 Tahun)	Target Jangka Menengah (2-3 Tahun)	Indikator Keberhasilan
Sistem informasi publik yang aman, adaptif, dan responsif	Penyusunan SOP verifikasi informasi dan penguatan kanal komunikasi resmi	Integrasi sistem peringatan dini disinformasi lintas OPD	Menurunnya insiden disinformasi terverifikasi; waktu respons < 24 jam
Layanan digital inklusif, adaptif, dan hibrida	Pemetaan titik bantuan layanan luring pada wilayah prioritas	Operasional penuh titik bantuan di seluruh kapanewon blank spot	Jumlah titik bantuan aktif; tingkat kepuasan pengguna layanan hibrida
Penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor	Nota kesepahaman kolaborasi dengan universitas dan operator jaringan	Skema magang/penelitian rutin tahunan; penambahan formasi SDM teknis	Jumlah kerja sama aktif; rasio SDM teknis terhadap beban kerja
Optimalisasi pemerataan infrastruktur berbasis wilayah prioritas	Penyelesaian peta prioritas wilayah blank spot	Penurunan jumlah desa blank spot dari 29 menjadi kurang dari 15	Jumlah titik Wi-Fi aktif; persentase desa blank spot tersisa

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil analisis SWOT dan Tes Litmus penelitian ini

Peta jalan pada Tabel 3 dirancang agar dapat direplikasi oleh Diskominfo di kabupaten/kota lain dengan karakteristik geografis serupa, khususnya wilayah berkontur perbukitan atau kepulauan yang menghadapi kendala pemerataan infrastruktur digital. Prinsip utama yang dapat diadaptasi adalah penetapan wilayah prioritas berbasis data blank spot dan kerentanan sosial, alih-alih pembagian anggaran secara merata per wilayah administratif, serta pelibatan kelompok informasi masyarakat sebagai mitra strategis jangka panjang, bukan sekadar penerima manfaat program.

3.6. Diskusi Komparatif dengan Studi Sejenis

Temuan strategi hibrida dan penguatan KIM di Gunungkidul memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dengan studi sejenis. Juanda dan Izzulhaq (2023) di Kabupaten Parigi Moutong menemukan bahwa pemerataan jaringan internet lebih banyak terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas OPD, sementara di Gunungkidul kendala utama justru bersifat topografis (karst dan perbukitan) sehingga strategi yang tepat pun berbeda: Parigi Moutong menekankan efisiensi anggaran, sedangkan Gunungkidul memerlukan pendekatan infrastruktur redundan berbasis wilayah prioritas. Sementara itu, Susanti dkk. (2023) pada penerapan Smart Village menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi desa sangat bergantung pada peran aktif perangkat desa sebagai penggerak, sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa KIM berperan sebagai jaringan informasi bottom-up yang efektif, memperkuat argumen bahwa keberhasilan digitalisasi daerah tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan lokal.

Perbandingan dengan studi Dimas dan Fahlevvi (2024) di Kabupaten Sumbawa turut memperkuat pola umum bahwa pengentasan kesenjangan digital daerah membutuhkan strategi berlapis, tidak sekadar penyediaan jaringan. Sementara itu, temuan Matutina dan Fahlevvi (2025) di Kabupaten Sorong justru menunjukkan paradoks di mana skor literasi digital yang relatif baik tidak berbanding lurus dengan tingkat adopsi layanan e-government, yang disebabkan oleh defisit kepercayaan institusional dan budaya komunikasi tatap muka (high-touch culture). Pola ini berbeda dari Gunungkidul, di mana kendala utama lebih

bersifat aksesibilitas fisik ketimbang kepercayaan institusional, sehingga menegaskan bahwa strategi pengurangan kesenjangan digital perlu disesuaikan dengan karakteristik sosio-geografis masing-masing daerah, bukan pendekatan yang seragam (one-size-fits-all).

3.7. Implikasi Teoritis dan Kontribusi terhadap Literatur

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat model multifaset akses digital yang dikemukakan Van Deursen dan Van Dijk (2015), bahwa kesenjangan digital tidak berhenti pada ketersediaan perangkat dan jaringan (material access), melainkan berlanjut pada keterampilan penggunaan dan pemanfaatan yang produktif (skills dan usage access). Argumen Warschauer (2004) bahwa inklusi digital pada dasarnya adalah persoalan inklusi sosial juga tergambar jelas dari kasus Gunungkidul, di mana kelompok lanjut usia dan masyarakat di wilayah terpencil menghadapi eksklusi berlapis, baik dari sisi geografis maupun sosial-ekonomi.

Dari perspektif tata kelola, temuan ini juga memperkaya diskursus smart governance di Indonesia. Ismaniah dan Sastrodiharjo (2025) menyoroti bahwa keberhasilan tata kelola digital adaptif sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal untuk merespons konteks spesifik daerah, sejalan dengan strategi hibrida yang dikembangkan Diskominfo Gunungkidul untuk menjembatani wilayah dengan akses digital tinggi dan rendah. Koswara (2023) turut mengingatkan bahwa tantangan sosial dan kelembagaan, seperti resistensi budaya dan keterbatasan koordinasi lintas sektor, kerap menjadi penghambat implementasi kebijakan transformasi digital daerah yang tidak kalah signifikan dibanding keterbatasan anggaran maupun infrastruktur, sebagaimana juga tecermin dari kelemahan koordinasi lintas OPD dalam matriks SWOT penelitian ini.

Perbandingan lintas-kawasan turut relevan: Panda (2025) dalam kajian implementasi strategi digital di beberapa negara Asia Tenggara menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan daerah dalam merespons keragaman kondisi lokal, sebuah pelajaran yang selaras dengan pendekatan wilayah prioritas yang direkomendasikan penelitian ini. Wijaya (2024) turut mencatat bahwa peluang dan tantangan penerapan teknologi digital di pemerintah daerah Indonesia banyak

ditentukan oleh kepemimpinan lokal dan komitmen anggaran, faktor yang juga teridentifikasi sebagai kekuatan utama Diskominfo Gunungkidul melalui dukungan anggaran Rp10,8 miliar untuk aplikasi informatika.

Sementara itu, dari sisi dampak sosial-ekonomi, temuan Jayanthi dan Dinaseviani (2022) tentang solusi kesenjangan digital selama pandemi COVID-19, Maharani dkk. (2023) tentang strategi diseminasi informasi Diskominfo Kabupaten Ciamis, Saragih dkk. (2024) tentang literasi digital untuk pemberdayaan UMKM, dan Savandha (2024) tentang jembatan kesenjangan urban-rural melalui teknologi di desa kecil Indonesia, secara konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi daerah paling optimal ketika program infrastruktur diiringi penguatan kapasitas kelembagaan lokal dan melibatkan aktif kelompok masyarakat, pola yang juga menjadi benang merah utama dalam strategi Diskominfo Kabupaten Gunungkidul.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, Diskominfo Kabupaten Gunungkidul telah menjalankan strategi pengurangan kesenjangan digital yang mencakup keempat dimensi Van Dijk, motivational, material, skills, dan usage access, melalui pembangunan infrastruktur Wi-Fi publik, pembinaan KIM, pelatihan literasi digital, dan digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitas strategi belum merata akibat keterbatasan geografis, SDM internal yang masih kurang, serta kesenjangan keterampilan digital masyarakat yang belum terselesaikan.

Kedua, berdasarkan analisis SWOT dan Tes Litmus, strategi prioritas yang tepat bagi Diskominfo Gunungkidul ke depan adalah: (1) pengembangan sistem informasi publik yang aman, adaptif, dan responsif; (2) layanan digital yang inklusif, adaptif, dan hibrida; (3) penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor; serta (4) optimalisasi pemerataan infrastruktur berbasis wilayah prioritas didukung oleh penguatan pemanfaatan digital dan literasi digital masyarakat sebagai strategi pendukung.

Secara kebijakan, hasil ini merekomendasikan tiga langkah konkret bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul: (1) mengalokasikan anggaran infrastruktur digital berbasis peta prioritas wilayah blank spot, bukan proporsional per kalurahan, agar wilayah karst dan perbukitan mendapatkan perhatian lebih besar; (2) menjadikan KIM sebagai mitra resmi berkelanjutan dalam program literasi digital dengan skema insentif dan pelatihan terstandardisasi; dan (3) mengintegrasikan sistem verifikasi informasi resmi untuk merespons ancaman disinformasi dan penyalahgunaan teknologi digital, termasuk perjudian daring, secara proaktif.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuannya. Pertama, durasi pengumpulan data yang relatif singkat (Desember 2025–Januari 2026) membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap dinamika musiman atau perubahan kebijakan jangka panjang. Kedua, cakupan penelitian yang terbatas pada satu kabupaten membatasi generalisasi temuan ke daerah dengan karakteristik geografis dan kelembagaan berbeda. Ketiga, penilaian Tes Litmus yang hanya melibatkan tiga responden internal Diskominfo berpotensi menimbulkan bias evaluasi-diri, sebagaimana telah didiskusikan pada bagian metode.

Temuan ini mengkonfirmasi argumen Van Dijk (2020) bahwa kesenjangan digital bersifat kumulatif dan multidimensi, sehingga strategi penanganannya pun harus terpadu, tidak hanya berfokus pada perluasan akses fisik, tetapi juga pada penguatan layanan, organisasi, dan keberlanjutan digitalisasi daerah secara inklusif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan daerah atau mengevaluasi efektivitas implementasi strategi prioritas yang telah dirumuskan, termasuk mengeksplorasi potensi pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung sistem informasi publik yang adaptif di wilayah dengan keterbatasan geografis (Pohan, 2023).

5. Daftar Pustaka

- Bryson, J. M. (2008). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial* (9 ed.). Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diningrat, R. F., Azhari, M. R., & Rachman, A. (2022). Digital Transformation Challenges in Indonesia: The Role of Human Resource Capability and Digital Literacy in Regional Development. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(2), 101–116. <https://doi.org/10.20473/japi.v8i2.2022.101-116>
- Haniko, P., Sappaile, B. I., Gani, I. P., Sitopu, J. W., Junaidi, A., Sofyan, & Cahyono, D. (2023). Menjembatani Kesenjangan Digital: Memberikan Akses ke Teknologi, Pelatihan, Dukungan, dan Peluang untuk Inklusi Digital. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(5), 306–315.
- Ikhbaluddin. (2020). Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Menerapkan Teknologi Informasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 41–57. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>
- Ismaniah, & Sastrodiharjo, I. (2025). Smart Governance and Digital Transformation in Local Public Services: A Systematic Analysis of Adaptive Governance in the Digital Era. *International Journal of Applied Management*, 5(1), 41–53.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia selama Pandemi COVID-19. *Jurnal IPTEK-KOM*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Juanda, & Izzulhaq, A. (2023). Strategi Diskominfo dalam Pemerataan Jaringan Internet di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 176–196. <https://doi.org/10.33701/jipm.r3i2.3567>
- Kabar Jawa. (2025, 17 November). Ribuan Penerima Bansos di DIY Dicoret Negara Terlibat Judi Online, Gunungkidul Jadi Penyumbang Terbanyak. <https://kabarjawa.com/berita/yogyakarta/ribuan-penerima-bansos-di-diy-dicoret-negara-terlibat-judi-online-gunungkidul-jadi-penyumbang-terbanyak>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024*. Kominfo RI.

- Koswara, A. (2023). Social and Institutional Challenges in the Implementation of Regional Digital Transformation Policies in Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Publik*, 8(1), 64–75.
- Maharani, R., Rahayu, Y. C., Seviani, D. K., & Akbari, M. Y. N. (2023). Strategi Diseminasi Diskominfo dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi kepada Masyarakat di Kabupaten Ciamis. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(3), 342–353. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.614>
- Mandala, D. R. T. L., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 147–173. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v6i1.4514>
- Matutina, E. J. B., & Fahlevvi, M. R. (2025). Kesenjangan Generasi dan Geografis dalam Literasi Digital: Implikasinya terhadap Kebijakan E-Government di Kabupaten Sorong. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 7(2), 201–216. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v7i2.5771>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurhidayat, Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the Digital Divide: Analyzing Public Participation in Indonesia's E-Government through the E-Participation Index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 481–497. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>
- Panda, A. (2025). Digital Strategy Implementation in Local Government: Lessons from Southeast Asia. *Journal of Public Policy and Administration*, 12(1), 88–101.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2026, 13 Mei). Digitalisasi Retribusi Wisata Gunungkidul: Target PAD Melonjak, Integritas Petugas Terjaga. *Gesuri.id*. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/digitalisasi-retribusi-wisata-gunungkidul-target-pad-melonjak-integritas-petugas-terjaga-b2pT8ZbfuH>
- Pohan, M. A. R. (2023). Kajian Literatur Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Merespons Prioritas Pembangunan Kota Bandung. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 250–273. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3620>
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

- Saragih, J. F. L., Faradilla, A. J., Nasution, R. A., Tafonao, D. F. A., Pitaloka, D., Amelia, B., Munawaroh, & Dongoran, D. (2024). Menutup Kesenjangan Digital: Studi tentang Meningkatkan Kehidupan UMKM Melalui Literasi Digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1788–1795.
- Savandha, S. D. (2024). Bridging the Urban-Rural Divide: Leveraging Technology for Development and Connectivity in Small Village, Indonesia. *Journal of Village Development Innovation*, 1(1), 15–28.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, W. F., Jannatuzzahra, K., Kartika, A. D. P., & Mukaromah, S. (2023). Upaya dalam Mengurangi Kesenjangan Digital pada Penerapan Smart Village. *Prosiding Seminar Nasional SITASI 2023*, 334–343.
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni. (2023). Transformasi Digital Pemerintah: Implementasi e-Government dan Hambatannya. *Journal Social Society*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.30605/jss.3.2.2023.338>
- Universitas Indonesia. (2023). Inovasi Digitalisasi Ekosistem sebagai Upaya Bangkitkan Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah. <https://www.ui.ac.id/inovasi-digitalisasi-ekosistem-sebagai-upaya-bangkitkan-sektor-umkm-dan-pariwisata-daerah/>
- Van Deursen, A. J. A. M., & Van Dijk, J. A. G. M. (2015). Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides. *The Information Society*, 31(5), 379–391.
- van Dijk, J. A. G. M. (2005). *The Deepening Divide: Inequality in the Information Society*. SAGE Publications.
- van Dijk, J. A. G. M. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press.
- Wagola, R., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Government Digital Transformation in Indonesia. In *HCI International 2023 Posters, Part IV* (pp. 286–296). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_18
- Warschauer, M. (2004). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Wijaya, I. D. (2024). Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Teknologi Digital bagi Pemerintah di Indonesia. *Pallangga Praja*, 6(2), 137–147.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).